

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang mengenai kasus gerakan aksi damai 212 di Kota Palembang dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan melakukan observasi langsung serta dokumentasi. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria informan utamanya adalah pengurus ormas-ormas Islam yang ada di Kota Palembang seperti Front Pembela Islam (FPI), Front Umat Islam (FUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Palembang, dan Organisasi Kerukunan Umat Beragama (OKB). Yang ikut serta dalam gerakan 212 di Jakarta tepatnya di lapangan Monas. Terdapat 4 orang narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama yaitu Habib Mahdi Muhammad Syahab (selaku Ketua Front Pembela Islam) FPI Palembang, Umar Said (selaku ketua Front Umat Islam) FUI Palembang, Ayik Farid Alaydrus (selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia) MUI Provinsi Sumsel Kota Palembang, Imron Rosyidi (selaku Ketua Organisasi Kerukunan Beragama Palembang, sekaligus Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumsel Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi dokumen. Penelusuran dokumen terkait dengan analisis *framing* dilakukan untuk melakukan pendalaman teoritis sehingga dapat menganalisis gerakan aksi bela Islam 212 dengan analisis *framing*. Data yang

telah diperoleh kemudian divalidasi dengan metode triangulasi. Data yang telah dinyatakan valid kemudian dianalisis dengan analisis *framing* untuk dapat menciptakan penjelasan yang holistik.

#### **A. Peran Media Dalam *Framing* Gerakan Aksi Bela 212**

Kemunculan gerakan sosial berupa berhimpunnya massa Islam dalam jumlah besar di Provinsi DKI Jakarta yang menuntut agar diberlakukannya proses hukum terhadap gubernur non-aktif Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah melakukan penistaan agama setelah beredar video rekaman dirinya yang menunjukkan kebencian terhadap kelompok muslim yang beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan perbincangan secara luas baik dalam ranah keagamaan, politik, hingga akademik. Gerakan yang kemudian dinamakan aksi bela Islam pertama kali dimulai pada tanggal 14 Oktober 2016 hingga 5 Mei 2017 tersebut dipimpin oleh Habib Rizieq Syhab dari Front Pembela Islam (FPI), dan Bachtiar Nasir dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan tujuan semula untuk mengawal kepastian hukum atas kasus Ahok meningkatkan solidaritas dikalangan umat.

Wacana dominan yang ditegakan oleh GNPF-MUI dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat muslim bahwasanya Ahok telah melakukan penistaan agama adalah dengan menepatkan Ahok sebagai non-muslim (juga berasal dari golongan minoritas) yang telah berani-berani menyatakan bahwa surah Al-Maidah ayat 51 digunakan untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih pemimpin kafir (non-muslim).

## B. Transformasi Gerakan 212

### 1) Media Sebagai Basis Gerakan

Karena media sosial memiliki kemampuan mendorong mobilisasi massa sekaligus menggalang respons tindakan secara cepat. Media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram* ikut berperan peran penting dalam menggulingkan pemerintahan. Salah satunya dalam kasus 212 tentang penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu.<sup>1</sup> Yang banyak melukai hati para umat Islam akun *facebook* Buni Yani menjadi cikal bakal pemicu terkait video pidato Ahok dalam penyuluhan program pemerintah di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September. Video tersebut menjadi viral dan tersebar di berbagai *social media*.



Gambar No.4.



Gambar No. 5.

Ahok dianggap telah menistakan agama Islam karena menyebut bahwa pemilih beragama Islam dalam pilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta “dibohongi” dengan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 51 yang di buktikan dalam sebuah video.

<sup>1</sup> I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov, 2017). h.3.

Aksi ini mendapat peliputan berita yang besar dari berbagai media baik dari dalam dan luar Negeri. Tidak dipungkiri bahwa pemberitaan Pilgub DKI Jakarta 2017 memang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia apa lagi unsur-unsur kampanye hitam (*black campaign*) yang menyangkut pasangan calon Gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah (1) Agus Harimurti Yudhono dan Sylviana Murni, (2) Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan (3) Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Pasangan Anies-Sandi yang maju atas tiket PKS dan Gerindra memang mendapat dukungan penuh oleh umat Islam yang mempunyai sentiment negative terhadap pasangan Ahok dan Djarot. tidak heran ketika Ahok terindeksi menistkan agama Islam masyarakat Islam bereaksi dengan cukup keras sehingga tercetus keras gerakan aksi bela Islam.

## **2). Politik Kepentingan (Menjelang Pemilihan Gubernur)**

Pada 19 April 2017 masyarakat Jakarta kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pilkada putaran II pada pilkada putaran II ini ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah berhasil lolos dari putaran I yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum DKI Jakarta.

Pertama yakni gubernur petahanan DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Nasdem dan Golkar sedangkan Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diusung oleh partai Gerindra dan PKS. Dimana pada putaran ke dua ini tentunya akan lebih banyak lagi isu-isu yang akan diangkat baik oleh media ataupun dari tim sukses kedua pasangan calon saat ini apalagi pada Pilkada Putaran ke II ini hanya tinggal dua pasangan calon yang memilik pendukung berbeda.

Terlebih lagi sosok calon Gubernur pertahanan Basuki Tjahaja Purnama yang beberapa saat lalu terkena kasus isu penistaan agama tentunya isu tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kubu persaingan dari Basuki Tjahaja Purnama.



Gambar No.6.



Gambar No.7.

Hal yang membuat aksi bela Islam menjadi polemik adalah bahwa aksi tersebut berkaitan dengan momentum pilkada di DKI Jakarta dan karenanya tuntutan untuk memenjarakan Ahok dengan pasal penistaan agama merupakan agenda politik yang sejak awal sudah dirancang dalam aksi tersebut oleh inisitor dan penggerakannya (GNPF-MUI). Polemik tersebut bukan hanya menjadi perhatian nasional bahkan juga internasional. Seperti dari kubu sebelah yaitu gerakan subuh berjamaah, dimana pentingnya kepemimpinan umat muslim dan isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar-golongan lainnya merupakan yang paling banyak menyita perhatian di media sosial. Isu tersebut bergulir sejak penetapan tanggal tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2017 dan keinginan Basuki Tjahaja Purnama untuk maju kembali dalam ajang 5 tahun tersebut. Isu tersebut makin panas bergulir kala Basuki Tjahaja Purnama melakukan salah bicara terkait surah Al-maidah ayat 51 yang ada dalam Al-Qur'an saat sosialisasi budidaya ikan di Kepulauan Seribu, Jakarta.

## 1. Aksi dan gerakan 212

### a) Pertaruhan Ahok dan Anis

Pada proses percalonan di pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat banyak dinamika yang terjadi awalnya Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan dirinya untuk maju pilkada Jakarta secara perorangan karena tidak memungkin akhirnya Ahok menerima dukungan dari empat partai dari putaran pertama yaitu partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan partai Nasdem. Pada putaran pertama isu-isu etnisitas dan agama mulai berkembang tetapi belum mempengaruhi suara pemilih pada putaran kedua isu-isu ini digunakan lagi oleh calon masing-masing untuk berkampanye. Pada situasi politik yang ada di Jakarta ketika isu etnis dijadikan alat untuk mendapatkan dukungan massa ini dinilai sangat efektif bagi pihak yang memanfaatkan.<sup>2</sup> Basuki Tjahaja Purnama kurang mendapat dukungan dari etnis mayoritas yang beragama Islam. Tetapi sebagian masyarakat ada juga yang tidak melihat dari agamanya melainkan dari kinerja yang telah dilakukan dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei yang dirilis SPIN (survey dan Poling Indonesia) pada tanggal 15 April 2017. Pasangan Anies-Sandi unggul 52% dari Ahok-Djarot yang mendapatkan 43% sisanya 5% belum menentukan pilihan melihat survey tersebut.

Maka dapat dilihat bahwa ketika pemimpin kota Jakarta adalah orang dari etnis keturunan maka dukungan masyarakat Jakarta menjadi terpecah-pecah dalam hal ini jejaringan Politik yang dimiliki Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dapat membantu dalam proses berkampanye dan memobilisasi

---

<sup>2</sup> Bagus Permadi. *Kontetasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Studi Tentang Jejaringan Memobilisasi Politik Pencalonan Ahok Djarot*, Jurnal Politik Media, volume 6, No 1. Diakses pada tanggal 22 juli 2019. Pukul 12.12 WIB.

masyarakat. Maksudnya disini Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menggunakan kekuatan-kekuatan elit Politik untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat ini dapat dilihat dari banyaknya partai besar yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada putaran pertama dan kedua.

Hal tersebut membuktikan bahwa elit politik Indonesia masih memiliki pengaruh yang besar dalam upaya memobilisasi masyarakat. Sama halnya dengan elit politik dukungan dari organisasi-organisasi non partai dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar. Kontribusi dari relawan dan organisasi non partai dapat dilihat dari upaya mereka membantu proses pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

## **2. Munculnya Aksi Massa 411, 212**

Aksi 4 November merupakan aksi bela Islam yang dikenal dengan aksi 411. Munculnya gerakan ini karena pernyataan Ahok selaku Gubernur pertahanan DKI Jakarta dalam acara sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka. Kepulauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016 berikut lebih jelasnya kutipan pidato Ahok pada saat itu.

Bapak ibu tidak usah kwatir ini pemilihan kan dimajukan kalau saya tidak terpilih pun, saya berhentinya Oktober 2017. Kalaupun program ini kita jalankan dengan baik pun ibu bapak tetap bisa panen dengan saya. Saya cerita ini biar bapak ibu bisa semangat jadi gak usah fikir kalau tidak ke pilih pasti Ahok programnya bubar nggak saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, yak kan, dibohongin pake surah Al-Maidah ayat 51. Macam-macam itu itu hak bapak ibu jadi kalau bapak ibu perasaan pilih nih karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu progam ini jalan saja jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa memilih Ahok gak suka sama Ahok tetapi programnya gua kalau gua ngerasa hutang budi nih jangan.

Kalau bapak ibu ngerasa nggak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke, jadi ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI kebetulan saya gubernur mempunyai program ini, jadi tidak ada hubungan dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya, wah jadi kepilih nanti saya, jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. Kalau cuman sekali, wah kepilih lho gue entar.<sup>3</sup>

Pada reaksi diatas Ahok mengatakan jangan mau dibohongin pakai surah Al-Maidah ayat 51. Dimana ayat tersebut berisi seruan bagi umat Islam agar tidak menjadikan non muslim sebagai auliya atau pemimpin berikut surah Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zhalim.

Awalnya Ahok dilaporkan oleh MUI Sumatera Selatan atas tuduhan penistaan agama sebagaimana pernyataan diatas dalam persidangan Ahok yang dilakukan pada 31 Januari 2017. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI pusat menjadi salah satu saksi dipersidangan menjalankan bahwa hasil keputusan dari empat komisi MUI ketika itu bukan hanya sekedar fatwa melainkan pendapat

---

<sup>3</sup>Herianto, diakses : <https://news.detik.com/berita/d-3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-allmaidah-51-yang-jadi-polemik>. Pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 15.15 WIB.

Keagamaan pendapat atau sikap keagamaan dinilai lebih tinggi dari fatwa, karena telah melibatkan empat komisi dan juga pengurus harian.

Sikap keagamaan yang telah dikeluarkan MUI kemudian menjadi perhatian public luas baik di level nasional bahkan internasional. Respon dari masyarakat pun beragam, ada yang mendukung, menolak atau bersikap netral dalam menanggapi pernyataan sikap tersebut. Disisi lain, adanya gelombang massa menuntut Agar ahok dipriksa dan dihukum semakin membesar. Kendati demikian tuntutan masyarakat tidak mendapatkan respon yang cepat dan terkesan tidak sungguh-sungguh dalam proses kasus tersebut atas dasar tersebut tercetuslah aksi massa yang menuntut penindakan hukum atas Ahok aksi pertama kali dilakukan pada jumaat 14 Oktober 2016. Dengan diikuti sekitar ratusan ribu massa. Peserta melakukan aksinya di depan gedung badan Reserse Krimial (Bereskrim) Polri, Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat.

Sebagai bangsa yang terdiri dari ajaran agama seharusnya masing-masing agama itu menghormati agama yang lain kalau dia tidak memahami tentang Islam janganlah berbicara tentang Islam kalau tidak memahami makna sebenarnya dari Al-Quran jangan menterjemahkan yang tidak benar.<sup>4</sup>

Pasca aksi bela Islam II Pada 4 November yang juga menimbulkan ketegangan politik antara elit politik di Indonesia juga ikut mempengaruhi bagaimana pewawancara mengenai aksi bela Islam diproduksi melalui format

---

<sup>4</sup> Ayik Farid Alaydrus, Selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan Palembang . Wawancara langsung pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 10.00 WIB.

pewacanaan baru dimana wacana yang disusun dan disebar luaskan kepada public.

Bukan hanya tentang membela Islam semata-mata tetapi bahwa kepentingan membela Islam itu ditunjukkan bagi persatuan dan kesatuan nasional dimana umat muslim sebagai mayoritas pendukung di Indonesia masih menginginkan bentuk NKRI sebagai Negara kesatuan dan bahwasanya aksi-aksi bela Islam selama ini sama sekali tidak melanggar ketentuan konstitusi dan bahkan dianggap (diklaim) sebagai manifestasi aspirasi suara umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya.

Gerakan 212 memang termotifasi dari semangat umat untuk bersatu setelah menghadapi berbagai ketipangan dari sisi hukum yang dirasakan saat itu bahwa hukum tidak lagi berpihak kepada kebenaran tetapi hukum sudah berpihak pada kekuasaan padahal dalam Asas hukum itu sendiri ada satu Asas *Equality Before the law* yang artinya (semua sama di mata hukum). Tetapi terkadang ketika sudah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tertentu hukum itu seolah-olah tumpul dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga umat tidak puas dengan hasil tersebut laporan yang tidak disikapi, sikap yang acuh tak acuh dari oknum-oknum aparat pihak hukum memancing reaksi keras dari umat karena merasa satu hal yang sangat sensitive dari kehidupan mereka yaitu kitab sucinya Al-Quran dinistakan oleh Ahok sehingga kejadian 212 ini tidak bisa dipandang sebagai salah satu gerakan forum ormas tertentu atau kekuatan tertentu, ini adalah gerakan mayoritas umat yang betul-betul menginginkan keadilan saat keadilan sudah tidak bisa diwujudkan maka jangan salahkan jika terjadi hal-hal semisal gerakan 212.<sup>5</sup>

Aksi bela Islam yang terjadi pada 2 Desember 2006 atau lebih dikenal sebagai aksi 212 merupakan kulminasi dari gerakan turun ke jalan yang untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur pertahanan DKI Jakarta.

---

<sup>5</sup> Habib Mahdi Muhammad Syahab, Selaku Ketua FPI (Front Pembela Islam) Palembang Sumsel. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2019. Pukul 09.00 WIB.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Yang membedakan dengan aksi sebelumnya di aksi bela Islam I dan II pada 4 November. Yang berakhir dengan unjuk rasa dan kerusuhan di beberapa lokasi di DKI Jakarta sebelumnya pada tanggal 4 November 2016. Sedangkan aksi bela Islam 212 merupakan puncak dari aksi membela agama dimana jutaan umat Islam secara kesadaran dirinya berkumpul untuk berdoa, bermunajat, wirid, dan tahlilan, mendengarkan tausiyah kemudian diakhiri dengan sholat jumaat berjamaah.



Gambar No.8.



Gambar No.9.

Analisis Proses pembingkaihan ada 3 yaitu :

Gambar table 03.

1. Pemanfaatan proses politik (menjelang pemilihan Gubernur DKI)	Adanya isu tentang penistaan agama tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri dari kubu pesaing.
2. Melihat proses percepatan dari aksi ke gerakan (pertaruhan Ahok dan Anies)	Isu etnis dan agama serta dapat bantuan dalam proses kampanye dari kekuatan eli politik partai besar yang mendukung Ahok dan Djarot.
3. Munculnya gerakan 411, 212	Gerakan yang termotifasi dari semangat umat Islam untuk bersatu setelah menghadapi berbagai kepastian dari sisi hukum yang dirasakan bahwasannya hukum tidak lagi berpihak kepada kebenaran tetapi hukum sudah berpihak pada kekuasaan . dimana hukum itu seolah-olah tumpul dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana

	mestinya sehingga umat yang tidak puas dengan hasil laporan yang tidak disikapi dan sikap acuh tak acuh. Ketika keadilan tidak diwujudkan maka terciptalah gerakan 411 dan 212.
--	---

Gambar table 04.

### C. Perubahan Media Ke Aksi 212 Nyata

1. Peran media sebagai dari semangat demokrasi. Shirky dan Lim berpendapat bahwa media sosial memiliki kemampuan mendorong mobilisaasi massa sekaligus menggalang respon tindakan secara cepat, media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *instagram* ikut berperan penting menggulingkan pemerintahan.<sup>6</sup> Akun *facebook* Buni Yani menjadi cikal bakal pemicu terkait video pidato Ahok dalam penyuluhan program pemerintahan di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Yang akhirnya video tersebut menjadi viral dan tersebar di berbagai media sosial secara keseluruhan. Dalam pidato Ahok memberikan gambaran mengenai isu yang di bahas dengan menyinggung ayat Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 51. Kalimat ini menjadi sorotan berbagai kalangan dan dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap agama Islam yang menimbulkan keresahan terhadap masyarakat banyak.
2. Penyajian opini adapun cara penyajian opini public yaitu dengan *framing* karena isu tertentu ketika dikemas dengan bingkaiian tertentu bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang berbeda atas suatu isu. *Framing* atau isu umumnya banyak dipakai dalam literatur gerakan sosial. Dalam suatu gerakan sosial ada strategi bagaimana supaya khalayak mempunyai pandangan

<sup>6</sup> I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov, 2017). h.3.

yang sama atas suatu isu itu sering sekali ditandai dengan menciptakan masalah bersama musuh bersama dan perlawanan bersama hanya dengan itu khlayak bisa digerakan dan mobilisasi semua itu membutuhkan *framing* bagaimana isu dikemas bagaimana peristiwa di pahami dan kejadian didefinisikan dan dimaknai. *Framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total melainkan dibelokan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulian fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih bagaimana aspek tertentu ditulis hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata kalimat gambar atau foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak atau lebih sederhananya lagi penjelasan *framing* ini seperti menggiring ‘opini publik.

3. Pembentukan aktifitas kolektif atau solidaritas dan identifikasi kolektif dan tujuan bersama kolektif adalah seperangkat keyakinan dan pemaknaan yang berorientasi pada tindakan yang memberi inspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial dengan kata lain kerangka aksi kolektif adalah seperangkat keyakinan kolektif untuk memungkinkan suatu pemikiran tercipta bahwa partisipasi di dalam aksi kolektif tampak berarti.<sup>7</sup> Sesuatu yang menggerakkan secara bersamaan dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersamaya kemudian mengentrai perubahan dari sekedar potensi gerakan nyata. Dengan cara menggoreskan *consensus*, perancang gerakan memainkan peranan penting dalam merangsang munculnya

---

<sup>7</sup> Bert Klandermans, *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). h. 7.

*consensus* semacam itu namun para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan solidaritas atau identitas yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama dan tujuan bersama adanya alasan yang bisa diungkapkan mengapa seseorang bergabung dalam gerakan sosial. dari sekedar keinginan nakal mencemooh otoritas hingga *insting* gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan pemegang otoritas, atau para elit, nilai dan kepentingan bersama merupakan basis dari tindakan mereka.<sup>8</sup>

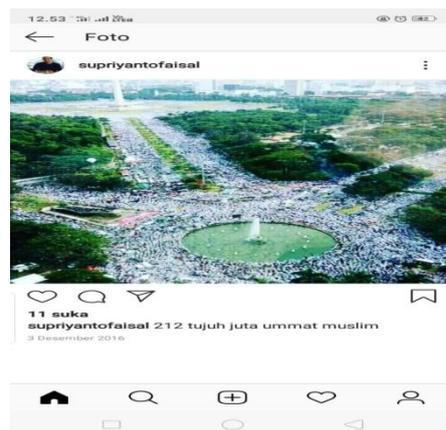
4. Laporan yang tidak disikapi sikap yang acuh tak acuh dari oknum-oknum aparat pihak hukum yang memancing reaksi keras dari umat Islam karena merasa Al-Quran telah dinistakan oleh Ahok ketika masyarakat mayoritas Islam benar-benar menuntut keadilan pada penguasa saat keadilan tidak bisa diwujudkan maka tercetuslah gerakan 212.
5. Strategi *Refleksi* media sosial memfasilitasi strategi refleksi ketika sebuah gerakan berhasil memaksakan solusi atas tuntutan mereka melalui produksi pengetahuan yang bersifat oposisi (*counter hegemony*) serta mengontrol arus informasi.<sup>9</sup> Strategi semantic dibuktikan melalui penciptaan dan penyebaran konten media sosial yang secara terang-terangan membongkar pernyataan

---

<sup>8</sup> Suharko, *Gerakan Baru Di Indonesia Repertoar Gerakan Petani*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10 No 1. Diakses pada 2 Juli 2019.

<sup>9</sup> I Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov. 2017). h. 112-113.

Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Mereka menyebarkan bukti-bukti secara jelas dan lugas seperti foto dan link berita atau video Ahok saat mengatakan jangan mau di bohongin oleh surah Al-maidah ayat 51. Hastag # aksi bela Islam dan # aksi damai 212 mempertegas argumen mereka bahwa kekuatan-kekuatan hukum itu seolah-olah tumpul dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga umat tidak puas dengan hasil tersebut laporan yang tidak disikapi sikap yang acuh dari oknum-oknum aparat hukum memancing reaksi keras dari umat karena merasa hukum tidak bisa diwujudkan maka jangan salahkan terjadi gerakan 212.



Gambar No .10.



Gambar No .11.

#### **D. Terjadi Transformasi Sosial dari Gerakan Massa ke Politik Media**

Karena media sosial merupakan media *online* yang menghubungkan bagi pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isu ketika aktivitas media sosial bertransformasi menjadi nyata terjadi representasi demokratis yaitu upaya mendorong perubahan isu publik menjadi agenda politik. Pada akhir 2016 berbagai media *online* sangat ramai membicarakan isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Pertahanan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kasus penistaan agama dan segala hal yang menyangkut denganya mencapai 279.852.00 dalam pencarian di *google* dengan total berita sebanyak 5.730 judul kemudian sisahnya ada pada media sosial seperti *twitter*, *instagram* dan *facebook* kasus tersebut menjadi fenomena besar sehingga memanaskan sosial politik tanah air.

Berawal dari dikejutkannya masyarakat oleh video yang di unggah oleh Bani yani terkait potongan pidato ahok dalam kunjungan kerja sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka Seribu. Pada 6 Oktober 2016 Buni Yani yang merupakan dosen Universitas Suwasta di Jakarta mengunggah video berdurasi 30 menit di jejaringan sosial *facebook* pribadinya. Video tersebut menayangkan pidato Ahok dengan di beri judul “Penistaan Agama” kemudian video tersebut menjadi viral hingga menimbulkan berbagai opini di media massa dan sosial media.



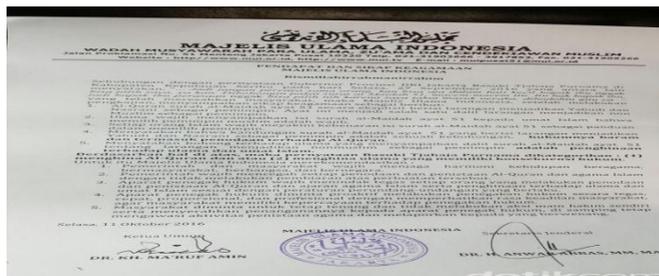
Gambar No.12.

Hal tersebut membuat ramai pemberitaan di media tercatat adanya 14 laporan dari masyarakat ataupun ormas-ormas kepada pihak kepolisian mulai tanggal 7 hingga 12 Oktober 2016. Awalnya Ahok dilaporkan oleh MUI Sumatera Selatan atas tuduhan penistaan agama. Kemudian di Jakarta Sekretaris Jendral DPP FPI, Novel Chaidir Hasan, juga melaporkan Ahok atas tuduhan menghina

agama ke Bareskrim Polri. Laporan-laporan tersebut berdasarsarkan 156a KUHP Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukum lima tahun penjara.

Atas desakan dan laporan masyarakat baik lisan maupun tulisan membuat Majelis Ulama Indonesia pusat bergerak cepat. MUI kemudian membentuk tim yang beranggotakan komisi fatwa. Komisi pengkajian komisi perundangan, dan komisi informasi komunikasi. Keempat komisi tersebut melakukan pengkajian dari investigasi yang dilakukan mulai 1 hingga 11 Oktober 2016. Hasil dari kajian yang melibatkan empat komisi tersebut berupa pernyataan yang menistakan Al-Quran dan ulama.

Majlis ulama Indonesia (MUI) Menyatakan sikap terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.<sup>10</sup>



Gambar NO.13.

<sup>10</sup> Indah Mutiara, diakses: <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>. Pada 23 juli 2019. Pukul 15.05 WIB.

Sehubung dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016. Yang antara lain menyatakan, jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya kan, dibohongi pakai surah Al Maidah ayat 51. macem-macem itu itu hak bapak ibu jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pillih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya. yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan Non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al- Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal diatas maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

untuk itu majlis ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintahan wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum, disamping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Sebagaimana pernyataan diatas dalam persidangan Ahok yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, Ma'aruf Amin selaku ketua MUI Pusat menjadi salah satu saksi di persidangan menjalankan bahwa hasil keputusan dari empat komisi MUI ketika itu bukanlah hanya sekedar fatwa melainkan pendapat keagamaan. Kendati demikian tuntutan masyarakat saat itu tidak mendapatkan respon yang cepat dan terkesan tidak sungguh-sungguh dalam memproses kasus tersebut.

Tugas seorang umat Islam pada dasarnya adalah amar'ma'aruf akhi mungkar menyampaikan yang baik dan mencegah kemungkaran kalau kita sebagai umat Islam mendiamkan perbuatan kemungkaran otomatis semua akan kena imbas nantinya.<sup>11</sup>

Atas dasar tersebut tercetuslah aksi massa yang menuntut penindakan hukum atas Ahok. Aksi pertama kali dilakukan pada jumaat 14 Oktober 2016 dengan diikuti sekitar ratusan ribu massa. Peserta melakukan aksinya di depan gedung Badan Reserse Kriminal (Bekrim) Polri, jalan medan merdeka Timur, Jakarta Pusat. Aksi ini diinisiasi oleh GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta) dan FPI (Front Pembela Islam) di bawah kemandon Rizieq Shihab. Serentak bersamaan dengan aksi di Jakarta, di bawah mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur tak lupa dari gelombang menuntut keadilan. Di Sumatera, Aceh, Padang, hingga Palembang turut angkat suara. Ribuan masyarakat Sumatera Selatan misalnya melakukan *longmarch* dari Masjid Agung Palembang menuju Kantor DPRD Sejauh lima kilometer memenuhi jalan-jalan.

---

<sup>11</sup> Ayik Farid Alaydrus, Selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Wawancara langsung pada tanggal 20 Juni 2019 Pukul 10.00 WIB.

Aksi 4 November merupakan aksi bela Islam kedua yang dikenal dengan aksi damai 411. Peserta yang hadir pada saat itu berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan jumlahnya lebih banyak dari peserta aksi bela Islam yang pertama selain dari ormas-ormas Islam aksi tersebut juga dihadiri oleh anggota Parlemen seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Serta turut hadir organisasi mahasiswa muslim seperti KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia), dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), tuntutan pada aksi 411 tetap konsisten dengan aksi sebelumnya yakni menegakan hukum yang berkeadilan.

Politik pewacanaan yang demikian sangat cepat sekali berubah khususnya pasca aksi bela Islam II pada 4 November yang juga menimbulkan ketegangan politik antara elit politik di Indonesia juga ikut mempengaruhi bagaimana pewacanaan mengenai aksi bela Islam direproduksi melalui format pewacanaan baru dimana wacana yang disusun dan disebarluaskan kepada public bukan hanya tentang membela Islam semata-mata tetapi bahwa kepentingan membela Islam itu ditunjukkan bagi persatuan dan kesatuan nasional dimana umat muslim sebagai mayoritas pendukung di Indonesia masih menginginkan bentuk NKRI sebagai Negara kesatuan dan bahwasanya aksi-aksi bela Islam selama ini sama sekali tidak melanggar ketentuan konstitusi dan bahkan dianggap (diklaim) sebagai manifestasi aspirasi suara umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya.

Oleh karena itu dalam mobilisasi massa aksi bela Islam III dukungan yang diberikan pada aksi ini mengalami perluasan simpati bahkan dari beberapa komunitas majelis taklim dan para santri dari beberapa daerah di luar Jakarta. Perluasan simpati ini muncul khususnya ketika media massa banyak

memberitakan reaksi yang dimunculkan oleh pemerintah JokoWidodo (jokowi).

Pasca aksi bela Islam II di bulan November 2016 melalui serangkaian tuduhan makar terhadap beberapa tokoh politik oposisi yang ikut terlibat memfasilitasi dan memberi dukungan dalam aksi tersebut. Kalangan inisiator aksi bela Islam khususnya FPI dan juga GNPF-MUI mentafsirkan reaksi pemerintah Jokowi itu sebagai suatu bentuk kezaliman oleh penguasa terhadap umat Islam inilah yang kemudian mendorong gelombang simpati public khususnya kaum muslim yang sebelumnya bahkan sama sekali tidak pernah menunjukkan simpati.

Pada wacana-wacana yang dikemukakan oleh FPI (Front Pembela Islam) sebagai ormas Islam yang pertama-tama mewacanakan aksi bela Islam I atau aksi yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan memunculkan polemic penistaan agama oleh Ahok yang hanya didukung oleh sedikit massa FPI aksi itu menjadi meluas khususnya sejak aksi bela Islam II didukung juga oleh organisasi ekstra kurikuler termasuk yang diorganisasi oleh FS-LDK (Forum Silaturahmi lembaga Dakwah Kampus), bahkan juga dukungan dari beberapa aktivis organisasi mahasiswa Islam seperti HMI (Himpunan mahasiswa Muslim Indonesia) dukungan bagi aksi bela Islam semakin membesar semenjak keluarnya fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok pada 4 November 2017.<sup>12</sup>

Dampak lain selain munculnya dukungan dan simpati yang sangat besar dari banyaknya kaum muslim pada aksi islam III atau aksi 212 adalah bagaimana ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain non keagamaan menggunkan wacana NKRI di dalam mewacanakan aksi bela Islam dan membuat pemerintah

---

<sup>12</sup> Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Lurin*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, volume 4 no. 2 Diakses pada 4 Agustus 2017.

pada akhirnya ikut memfasilitasi aksi yang ditunjukkan melalui shalat jumat di lapangan Monas pada tanggal 2 Desember 2016, yang bahkan akhirnya juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Jadi dapat dikatakan bahwa aksi bela Islam III merupakan momentum puncak mobokrasi yang didesain secara sukses oleh inisiator dan ormas-ormas penggerak aksi itu maupun para elit politik yang sejak awal sudah menunjukkan dukungan terhadap aksi ini misalnya seperti yang ditunjukkan melalui keterlibatan beberapa ormas non-islam seperti contohnya JMP (jaringan Merah-Putih) yang pernah terlibat dalam mobilisasi massa bagi pendukung salah satu capres dari partai Gerindra pada pemilu 2014. Dukungan elit-elit politik khusus mereka yang menjadi oposisi pemerintah saat ini (Jokowi) dalam aksi bela Islam meskipun tidak dimunculkan dalam kehadiran mereka di dalam aksi tetapi nampak di dalam pernyataan-pernyataan yang mereka munculkan di media massa.